

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA- RUSIA

Indonesia dan Rusia merupakan 2 negara yang sampai saat ini masih menjalin hubungan dengan baik. Di tahun ini (2012) , hubungan kedua negara ini telah memasuki tahun ke-62 . Angka 62 tentu saja bukan angka yang biasa, angka tersebut merupakan angka yang cukup spektakuler dalam menjalin sebuah hubungan baik. Apalagi seperti diketahui, usia Indonesia baru saja memasuki usia yang ke-67 pada 17 Agustus 2012 , itu berarti bahwa hubungan kedua negara ini terjalin cukup cepat, 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia.

A. Sejarah Hubungan Indonesia –Rusia

1. Hubungan Indonesia-Rusia Pra-Kemerdekaan Indonesia

Pada awal abad ke-XVI Indonesia dikuasai oleh penjajah dari Eropa. Pada mulanya, yang menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis. Setelah “armada agungnya” hancur pada tahun 1588, Portugis yang pada waktu itu bergabung dengan Spanyol, kehilangan Indonesia, dari tangan Portugis Indonesia direbut oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan Syarikat Hindia - Timur Belanda atau VOC yang memperoleh hak untuk mempunyai tentara sendiri mengumumkan perang mengadakan perdamaian mengeluarkan

uang dan sebagainya. Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda selama 350 tahun.¹⁶

Pada abad ke-XIX Belanda menghadapi perlawanan gigih dari rakyat Kesultanan Aceh. Dalam usahanya memecahkan konflik Aceh dengan Belanda, Sultan Aceh mencari dukungan dari negara lainnya termasuk dari Rusia juga.¹⁷

Pada tahun 1879 kapal layar Rusia "Vsadnik" berlabuh di Penang, delegasi yang terdiri dari wakil-wakil pemberontak Aceh menghubungi kapten kapal tersebut dengan "permohonan kepada Yang Mulia Sang Pemimpin Imperator agar negara mereka memperoleh kewarganegaraan Rusia". Kementerian Kelautan melapor kepada Tzar mengenai permohonan tersebut yang memerintahkan mengalihkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Jawaban Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Kelautan menyatakan bahwa pada saat ini Menteri Luar Negeri berpendapat bahwa tidak mungkin "membahas masalah mengenai masuknya rakyat Aceh menjadi warganegara Rusia berhubung di kemudian hari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman diantara Pemerintahan Imperator dengan Belanda."¹⁸

Pada tanggal 15 Pebruari 1904, yang mengemban tugas Konsul Rusia di Singapura, Rudanovskiy memberitahukan bahwa Sultan Aceh menyampaikan

¹⁶ Sejarah Indonesia – Rusia : http://www.indonesia.mid.ru/relat_ind_04.html , akses tanggal 24 Oktober 2012

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

kepada Konsulat surat permohonan yang dialamatkan kepada Nikolay II tentang permohonan untuk menerima daerah kekuasaannya dibawah perlindungan Rusia.

Kementrian Luar Negeri pada tanggal 24 April 1904 menyampaikan kepada Konsulat Rusia di Singapura bahwa :

“Menurut kesimpulan departemen kelautan yang dihubungi dalam hal ini, bahwa permohonan tersebut tidak mungkin dikabulkan. Maka berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan pula bahwa dari segi lain mengabulkan permohonan Sultan dapat menyebabkan kesulitan yang tak diharapkan dengan pihak Belanda yang mempunyai koloni di bagian selatan pulau tersebut, kami mohon agar Anda dengan perkataan yang ramah menolak usulan tersebut dari Sultan Aceh”.¹⁹

Sebagai akibat dari pengaktifan politik luar negeri di kawasan Timur Jauh pada tahun 90-an di abad ke-XIX, Pemerintah Rusia memperlihatkan perhatiannya terhadap Indonesia. Kapal-kapal militer Rusia dalam pelayarannya ke Vladivostok mulai lebih sering memasuki pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1885, telah dibuka wakil-konsulat tidak tetap Rusia di Batavia (nama Jakarta pada zaman itu). Sesuai dengan saran dari Kementrian Kelautan pada tahun 1893 konsulat tersebut dirubah menjadi konsulat tetap. Namun pembukaan konsulat tidak mendorong perluasan hubungan diantara Rusia dan Indonesia. Perdagangan diantara kedua negara tersebut tidak dijalankan secara langsung, melainkan melalui Belanda, Jerman dan Inggris pada umumnya.

Konsul tetap Rusia di Batavia yang pertama dan terakhir, M.M.Bakunin bertugas selama lima tahun (1895 –1899). Tidak hanya sekali beliau mengajukan

usulan yang berdasar mengenai pembukaan hubungan dagang langsung diantara Rusia dan Indonesia. Misalnya M.M. Bakunin mengusulkan agar komite Armada Sukarela membuka rute pelayaran reguler diantara Odessa dan Vladivostok dengan singgah di salah satu pelabuhan Indonesia. Disamping ini M.M. Bakunin mengusulkan agar membuat percobaan kultivasi teh Jawa, tembakau Sumatera (delhi) dan tumbuhan lainnya di kawasan selatan Rusia. Namun usulan tersebut tidak mendapat dukungan di lingkungan pemerintahan.

Maka dengan kenyataan demikian pemeliharaan Konsulat tetap Rusia di Batavia menjadi sia-sia, sehingga pada tahun 1899 statusnya diturunkan menjadi tidak tetap, dan pada tahun 1913 konsulat ditutup.

2. Pengakuan Uni Soviet Terhadap Kedaulatan Indonesia

Indonesia yang secara politis tergantung penuh kepada Belanda, tidak berhak untuk mempunyai perwakilan di luar negeri atau menjalin hubungan dengan negara tetangga sekalipun. Seluruh hubungan luar negeri Indonesia dalam bidang ekonomi berada dibawah pengawasan total administrasi kolonial Belanda. Pada bulan Maret 1942 penguasa Belanda di Indonesia menyerah kepada tentara Jepang yang kemudian menduduki Negara Indonesia.

Setelah Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang, dalam suasana kekalahan telak militaris Jepang, pada umumnya terjadi peningkatan gerakan kemerdekaan-pembebasan di kawasan Timur, wakil-wakil gerakan patriotik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumumkan kemerdekaan

Indonesia. Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan Wakil Presiden adalah Moh.Hatta. Namun Belanda tidak menghentikan usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya dan akhirnya berhasil menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam sidang PBB pada bulan Januari 1946 Uni Soviet yang pertama menentang aksi Belanda terhadap Indonesia.

Pada Januari 1949, Konferensi 19 negara Asia di New Delhi mengajukan tuntutan ke Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Belanda membebaskan wilayah yang diduduki dan memberikan kepada Indonesia kedaulatan penuh sebelum tanggal 1 Januari 1950. Pada akhirnya Belanda terpaksa duduk di meja perundingan dengan wakil-wakil Indonesia yang diselenggarakan di Den Haag pada Agustus 1949.

· Segera setelah selesainya perundingan, pada tanggal 24 Desember 1949 Duta Besar Belanda di Moscow, Wisser, menyerahkan Nota kepada Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko, yang menyatakan bahwa sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai di Den Haag diantara Belanda dan delegasi Indonesia pada tanggal 2 Nopember 1949 dan yang telah diratifikasikan oleh parlemen semua negara yang berkepentingan, pada tanggal 27 Desember 1949 dalam upacara resmi, Republik Serikat Indonesia akan menerima kedaulatan penuh atas seluruh wilayah Hindia Belanda dengan perkecualian New Guinea Belanda (Irian Barat), dan dengan akte tersebut Republik Indonesia Serikat akan dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

Dalam Nota tersebut Pemerintah Belanda juga menyampaikan harapan bahwa setelah pemberian kedaulatan Pemerintah Uni Soviet akan mengakui negara baru.

Pada 27 Desember 1949 seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, kecuali Irian Barat diserahkan kepada kedaulatan Indonesia. Pada 25 Januari 1950 A.A.Gromyko menyerahkan Nota Jawaban kepada Duta Wisser dimana Kementrian Luar Negeri Uni Soviet memberitahukan kepada Pemerintah Belanda bahwa :

“dikarenakan pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag diadakan upacara penyerahan kedaulatan, maka Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk memberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat bahwa Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan menjalin hubungan diplomatik”.²⁰

Pada waktu yang sama A.Y. Vyshinskiy mengirim telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat Hatta yang menyatakan bahwa Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan menjalin hubungan diplomatik.

Pengumuman resmi TASS mengenai pengakuan Uni Soviet terhadap Indonesia diterbitkan pada tanggal 26 Januari 1950. Berita mengenai akte tersebut dari Pemerintah Uni Soviet diterima di Indonesia dengan antusias. Pers Jakarta

mengapresiasikannya dengan banyaknya publikasi pengumuman dan komentar. Koran ibukota "Merdeka" menerbitkan berita di halaman muka, dengan judul dengan huruf besar "Rusia Soviet mengakui Republik Indonesia Serikat" menempatkan informasi bahwa Menlu Indonesia telah menerima pengumuman resmi dari Pemerintah Rusia mengenai pengakuan Republik. Ditekankan pula bahwa tokoh terkemuka politik dan negarawan Republik telah menilai positif pengakuan tersebut. Beberapa anggota pemerintah dan wakil-wakil dari lingkungan penguasa di Jakarta menyampaikan pendapatnya bahwa berkat pengakuan tersebut bertambah pula kesempatan bagi Republik Indonesia Serikat untuk menjadi anggota PBB.

3. Kesepakatan Pembentukan Hubungan Diplomatik Indonesia-Uni Soviet Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 2 Pebruari 1950 diselenggarakan sidang kabinet menteri Republik dimana disahkan jawaban pihak Indonesia atas pengumuman Pemerintah Soviet tertanggal 25 Januari 1950. Dalam telegram jawaban Menteri Luar Negeri Indonesia M. Hatta, yang dikirim dari Jakarta ke Moscow pada tanggal 3 Pebruari 1950 mengkonfirmasi diterimanya telegram dengan keputusan Pemerintah Uni Soviet yang mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan merencanakan menalin hubungan

“Menilai dengan sepatutnya keputusan tersebut, saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan rasa hormat yang besar memberitahukan bahwa kami menilai tinggi pengakuan tersebut. Pemerintah saya selalu terbuka terhadap mulainya pembicaraan mengenai realisasi hubungan diplomatik”.

Tanggal diterimanya jawaban positif dari Pemerintah Indonesia (3 Pebruari 1950) atas pemberitahuan Pemerintah Soviet mengenai pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dijadikan tanggal pembukaan resmi hubungan diplomatik diantara kedua negara tersebut.

Pada pertengahan bulan Februari, Pemerintah Indonesia mendapat usulan dari Pemerintah Soviet untuk memulai pembicaraan. Dalam telegramnya Kementrian Luar Negeri Uni Soviet tertanggal 15 Pebruari 1950 memberitahukan bahwa ada dua cara untuk mengadakan pembicaraan, yaitu apakah Indonesia mengutus wakilnya, atau Rusia mengutus wakilnya untuk datang ke Indonesia. Pihak Rusia menyampaikan bahwa pihak mereka setuju dengan kedua cara tersebut, tinggal menunggu keputusan dari pihak Indonesia saja mengenai cara yang mana yang akan ditempuh untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hubungan bilateral yang akan mereka jalin.

Pada 21 Pebruari 1950 Hatta mengirim telegram kepada A.Y.Vyshinskiy dimana beliau menyatakan:

“dengan rasa puas kami menyampaikan bahwa kami menerima usulan Anda. Kami akan mengutus wakil-wakil kami untuk mengadakan perundingan. Mengenai tanggal dan susunan delegasi akan kami beritahukan selanjutnya

Masyarakat Indonesia membahas secara luas perspektif-perspektif hubungan Soviet-Indonesia: misalnya, pada awal bulan Maret anggota Parlemen dari Partai Nasional Manai Sophian mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah mengenai rencana lanjutannya guna menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Pada tanggal 11 Maret, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, M. Hatta mengumumkan bahwa kini sedang dilakukan pembentukan delegasi Pemerintah yang dikepalai oleh L.N.Palar untuk melaksanakan pembicaraan di Moskow mengenai langkah-langkah konkrit dalam rangka menjalin hubungan diplomatik.

Pada tanggal 11 April, Hatta mengirim telegram kepada A.Y.Vyshinskiy dimana beliau menyatakan: "Delegasi Indonesia dalam rangka mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran misi diplomatik berangkat dari Jakarta ke Moscow pada tanggal 15 April 1950".

Dalam susunan delegasi Indonesia terdapat Lambertus Nicodemus Palar (kepala delegasi), Sujono Hadinoto (pemimpin fraksi PNI di parlemen), Jusuf Wibisono (anggota parlemen), wakil ketua partai Masyumi, dan Mohammad Yamin (ketua seksi parlemen untuk bidang urusan luar negeri), beserta Rubiyono (sekretaris) dan Nuradi (penerjemah).

Delegasi tiba di Moscow pada tanggal 29 April. Pada tanggal 3 Mei kepala delegasi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.Y.Vyshinskiy surat dari Perdana menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat, M.Hatta yang menyatakan bahwa Palar diberikan wewenang

untuk mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet.

Pada tanggal 3 dan 5 Mei delegasi diterima oleh A.Y.Vyshinskiy. Waktu resepsi pada tanggal 5 Mei Palar menyatakan bahwa keputusan Pemerintah Uni Soviet untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat memberi harapan bagi masyarakat Indonesia bahwa Uni Soviet akan mendukung permintaan Indonesia menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa. Palar menambahkan bahwa hal ini dikaitkan Pemerintah Indonesia dengan pertukaran perwakilan diplomatik diantara Uni Soviet dan Indonesia.

Atas pernyataan Palar A.Y.Vyshinskiy menjawab bahwa "pada pembahasan di Persatuan Bangsa-Bangsa, permintaan Indonesia untuk menjadi anggota PBB, Pemerintah Soviet akan membahas masalah ini dengan bertimbang rasa".Palar menyampaikan juga pertimbangannya bahwa sebelum pertukaran perwakilan diplomatik dilakukan sebaiknya diawali dengan pengiriman kelompok kecil oleh masing-masing negara, yaitu Uni Soviet ke Jakarta dan Indonesia ke Moscow guna melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan penempatan perwakilan. (Pada pembicaraan telah disepakati bahwa perwakilan akan mempunyai status kedutaan).

Pertanyaan Vyshinskiy bagaimana pendapat delegasi mengenai pembicaraan lanjutan, dijawab oleh Palar: langkah-langkah berikutnya harus berupa pertukaran Nota-Nota mengenai perjanjian diplomatik untuk masing-

Setibanya di Jakarta pada tanggal 15 Mei Palar menyatakan bahwa delegasi telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan beliau sendiri puas dengan hasil pembicaraan di Moscow. Pada malam hari yang sama Palar, Hadinoto, Wibisono dan Yamin diterima oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 16 Mei, Kabinet Menteri Republik Indonesia mendengarkan laporan delegasi mengenai hasil pembicaraan di Uni Soviet. Dalam sidang tersebut Soekarno turut hadir. Komunike resmi yang dipublikasikan setelah sidang, menyatakan mengenai tercapainya persetujuan diantara Uni Soviet dan Indonesia untuk mengadakan pertukaran kedutaan dan didapatkannya dukungan dari pemerintah Uni Soviet terhadap keanggotaan Indonesia di PBB.

4. Pertukaran Perwakilan Diplomatik Indonesia-Uni Soviet

Pada bulan Agustus 1950 Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan 34 negara. Kementrian Luar Negeri Indonesia menghadapi tugas berat, yaitu mendirikan misi diplomatiknya, terutama di negara-negara terbesar di dunia, serta melengkapi susunan kepegawaian dengan kader-kader nasional. Pada akhir tahun Indonesia telah mempunyai 28 misi diluar negeri dengan status yang berbeda-beda: 17 – di Asia, 6 – di Eropa, 4 – di Amerika, dan 1- di Afrika. Pada keseluruhan ke-28 misi ini bekerja 94 diplomat dan pegawai konsulat Indonesia. Akibat tidak adanya tenaga kerja sendiri yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, maka untuk tahap awal terpaksa mengundang beberapa diplomat Belanda untuk bekerja di dinas luar negeri Republik Indonesia. Selanjutnya dengan bertahap seluruh diplomat Belanda digantikan oleh orang Indonesia.

Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pada bulan September 1950 Uni Soviet membantu Indonesia menjadi anggota PBB. Pada tanggal 9 Pebruari 1953, wakil kepala komisi bidang urusan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat O.Rondonuwu (kelompok nasionalis), anggota parlemen D.Gondokusumo (Partai Rakyat Nasional), Asraruddin (Partai Buruh), Djokoprawiro (Partai Indonesia Agung) dan M.Nitimihardjo (partai Murba) mengajukan kepada Dewan agar membahas proyek resolusi mengenai pertukaran secepatnya perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet. Pencipta draft resolusi menyatakan bahwa "politik luar negeri Indonesia yang netral akan belum sempurna sampai dengan Uni Soviet dan Indonesia melaksanakan pertukaran perwakilan diplomatik...Pembukaan kedutaan akan memperbesar kesempatan untuk menukarkan bahan baku dari Indonesia, misalnya karet, dengan peralatan industri dari Rusia".

Pada tanggal 9 April 1953 Dewan Perwakilan Rakyat dengan 82 suara setuju dan 42 suara tidak setuju, menyetujui resolusi O.Rondonuwu mengenai pertukaran perwakilan dengan Uni Soviet pada tahun yang sama, yaitu 1953.

Pada sidang VIII DK PBB yang dilakukan pada September 1953 di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia Soekarno secara lisan memberitahukan kepada kepala delegasi Soviet A.Y.Vyshinskiy mengenai niat pemerintah Indonesia membuka kedutaannya di Uni Soviet. Sebagai penegasannya pada 30 Nopember, Sunaryo mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet dimana sekali lagi dinyatakan mengenai niat pemerintah Indonesia membuka kedutaannya di Moscow dalam waktu dekat

Pada tanggal 17 Desember, Menteri Luar Negeri Uni Soviet menginformasikan Sunaryo bahwa usulan dari Pemerintah Indonesia tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Soviet. Pada gilirannya Pemerintah Soviet siap mengirim Duta Besar Uni Soviet ke Jakarta.

Pada upacara penyerahan surat kepercayaan kepada Kepala Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet K.E.Voroshilov di Kremlin, yang diadakan pada tanggal 13 April 1954, Duta Besar Indonesia pertama untuk Uni Soviet Subandrio atas nama pemerintahnya menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan diplomatik, serta hubungan persahabatan yang erat diantara kedua negara. Duta Besar menekankan bahwa menjalin hubungan persahabatan yang didasari persamaan hak, baik dengan Uni Soviet maupun dengan negara-negara dan masyarakat dunia lainnya, membuka kesempatan bagi Republik Indonesia membuat hubungan erat dengan Uni Soviet dalam bidang ekonomi, yang mana akan membuka kesempatan menggunakan kemajuan teknik dan pengalaman Uni Soviet dengan tujuan menaikan taraf hidup rakyat Indonesia.

Perdana Menteri Sastroamidjoyo pada tanggal 16 Agustus 1954 melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan keputusannya mengenai pertukaran perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet. Dia memberitahukan anggotanya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam kerja beberapa konferensi internasional. Seiring dengan keikutsertaan dalam sidang Majelis Umum PBB Indonesia mengirim delegasinya untuk ikut rapat Dana

Moneter Internasional, MOT, konferensi mengenai permasalahan pelayaran (Ceylon), ke Konferensi Islam Ekonomi Internasional (KIE) di Karachi dan pertemuan internasional lainnya.

Pada tanggal 14 September 1954 Duta Besar Luar Biasa dan Dengan Kuasa Penuh Uni Soviet di Indonesia D.A.Zhukov datang ke Jakarta. Beliau memberikan pengumuman kepada pers dimana atas nama rakyat Uni Soviet beliau menyampaikan sambutan yang hangat serta kehendak agar rakyat Indonesia memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, dan meyakinkan bahwa perkembangan hubungan diplomatik diantara Uni Soviet dan Republik Indonesia akan mempunyai dampak positif terhadap perluasan kerjasama negara kita dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, yang mana akan mendorong perluasan dan penguatan persahabatan, serta mengabdikan pada kepentingan perdamaian dunia dan keamanan internasional.

Pada tanggal 20 September, Duta Besar D.A.Zhukov menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Soekarno. Dalam Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet K.E.Voroshilov secara khusus menekankan bahwa dengan menganut politik yang mempererat hubungan antara negara-negara dan dengan keinginan mengembangkan hubungan persahabatan diantara Uni Soviet dan Indonesia, maka Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet memutuskan dan di hadapan pihak Indonesia mengangkat Tuan Dmitriy Aleksandrovich Zhukov menjadi Duta Besar Rusia yang Luar Biasa

Dokumen pertama, yang merupakan suatu hasil periode awal dalam hubungan diantara Uni Soviet dan Indonesia adalah Pernyataan Bersama Uni Soviet – Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 11 September 1956 di Moscow oleh Wakil Satu Menteri Luar Negeri Uni Soviet A.A.Gromyko dan Menteri Luar Negeri Indonesia R. Abdulgani. Isi dokumen tersebut membuktikan bahwa hubungan didirikan atas dasar lima prinsip yang diketahui oleh seluruh dunia, yaitu saling menghormati keutuhan teritori dan kedaulatan, tidak menyerang, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai.

Dalam pernyataan bersama ditandai juga dengan tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai pengaturan kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi-teknik yang dilakukan berdasarkan prinsip persamaan dan saling menguntungkan. Keputusan Uni Soviet dan Indonesia untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang budaya, melakukan pertukaran delegasi, mahasiswa dan budayawan mempunyai arti penting dalam tercapainya pengertian yang mendalam diantara kedua negara.

B. Hubungan Indonesia-Rusia Pasca Kemerdekaan Indonesia

Federasi Rusia adalah salah satu negara adidaya yang disegani dan pemimpin negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis saat perang dingin (1947-1991). Secara geografis, Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah terluas di dunia (17,8 juta km), terdiri atas 11 zona waktu (bandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki 3 zona waktu). Secara politis, Rusia merupakan

anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota Group 8 (D-8), G-20 dan BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina), sebuah aliansi negara kuat di dunia selain Amerika Serikat.²³

Dengan segala potensinya dan predikat negara adidaya, keberadaan Rusia sangat penting dan strategis dalam memainkan perannya di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan yang paling dinamis di dunia ini, Rusia ikut serta memainkan perannya dalam berbagai forum regional dan sub-regional Asia Pasifik seperti APEC, ARF, ASEAN+Rusia, Asia Europe Meeting (ASEM) dan East Asia Summit (EAS).²⁴

Dinamika politik dan hubungan luar negeri Rusia di berbagai belahan dunia memunculkan interaksi dengan semua negara mitranya, termasuk dengan Indonesia. Secara resmi hubungan RI-Rusia dimulai pada tahun 1950 ketika negeri beruang merah tersebut membuka perwakilan diplomatiknya di Indonesia. Sejak itu, hubungan keduanya berlangsung tanpa jeda, meski tidak selalu mulus, ada up and downs alias pasang surut. Pada suatu masa hubungan RI-Rusia pernah sedemikian mesranya, tapi di masa lain sempat mendingin.²⁵

Tomi Lebang²⁶ lewat bukunya “Sahabat Lama, Era Baru : 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia” menggambarkan pasang surut

²³ Membuka Album Hubungan RI-Rusia, <http://media.kompasiana.com/buku/2010/08/16/melihat-kekecewaan-soekarno-di-st-petersburg/>, akses tanggal 2 November 2012

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Tomi Lebang adalah wartawan Koran Tempo yang aktif sampai tahun 2003, sejak tidak aktif dalam dunia wartawan. Tomi Lebang bekerja sebagai penulis dan konsultan di Jakarta

hubungan RI-Rusia dengan memetakan hubungan keduanya sesuai tiga babakan waktu yang disebutkan oleh Wakil Duta Besar RI untuk Rusia Agus Sriyono dalam artikelnya “60 Tahun RI-Rusia” yang juga dimuat dalam buku ini, yaitu masa pasang (1950-1965), surut atau titik terendah (1965-1991) dan era kebangkitan (sesudah 1991).²⁷

1. Hubungan Indonesia-Rusia Pada Masa Orde Lama

a. Hubungan Indonesia-Uni Soviet Tahun 1940 – 1947

Pada masa orde lama, hubungan Indonesia-Rusia berlangsung sangat harmonis, kerjasama kedua Negara ini berlangsung di berbagai bidang. Militer, Pendidikan, Budaya merupakan bidang-bidang yang paling menonjol dalam hal kerja sama bilateral antara kedua Negara. Tidak kurang 2000 mahasiswa Indonesia belajar diberbagai Universitas di Uni Soviet, Bantuan dana untuk memodernisasi persenajataan bagi TNI juga pelatihan teknisnya sampai karya-karya sastra Indonesia yang diterjemahkan kedalam bahasa Rusia dan di terbitkan di Negara tersebut. Kesamaan Ideologi dan tekad untuk melawan kolonialisme dan imperialisme menjadi dasar dari hubungan yang harmonis ini.²⁸

Tahun 1940, Semaun yang merupakan salah satu tokoh diaspora Indonesia di Uni Soviet menerbitkan brosur berjudul Indonesia, dicetak mencapai

²⁷ *Ibid*

²⁸ Antara Indonesia dan Rusia : Sebuah Tinjauan Sejarah ,

<http://id.scribd.com/doc/65945608/Antara-Indonesia-Dan-Rusia> Akses tanggal 2

oplah 50 ribu ekslembar. Awal tahun 1945, atas upaya sungguh-sungguh dari para diaspora Indonesia di Uni Soviet waktu itu, jurusan Indonesia resmi didirikan di institut studi bangsa-bangsa Asia-Afrika, MGU tahun 1945. Kemudian menyusul jurusan filologi Indonesia didirikan di universitas Leningrad (St. Petersburg) tahun 1950.²⁹

Pada tahun 1945-1947, rakyat Rusia mengecam rencana Belanda yang ingin melestarikan penjajahan di bumi Indonesia. Surat kabar Rusia dipenuhi kisah-kisah perjuangan rakyat Indonesia. Salah satunya melukiskan seorang pejuang kemerdekaan dengan slogan: Darahku merah, Tak sudi dijajah. Tahun 1948, Uni Soviet secara de-facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu disusul dengan pengakuan de-jure sekaligus usulan pembukaan diplomatik Uni Soviet-Indonesia pada tanggal 3 Februari 1950.³⁰

Hubungan Indonesia dan Uni Soviet pernah mengalami puncak kemesraan pada zaman Presiden Soekarno. Kerjasama diberbagai bidang marak dilakukan, salah satunya bidang pendidikan. Ribuan mahasiswa Indonesia dikirim ke Uni Soviet waktu itu untuk belajar berbagai disiplin ilmu. Karya para penulis terkenal Indonesia banyak diterjemahkan ke bahasa Rusia. Acara seni budaya kedua bangsa rutin diadakan sehingga rakyatnya saling mengenal satu sama lain

²⁹ Diaspora Indonesia Di Rusia :

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Diaspora+Indonesia+di+Rusia&dn=20120910064526> akses tanggal 11 November 2012

Presiden Indonesia pada masa itu, Soekarno, melakukan 4 kali mengunjungi Uni Soviet dan bertemu dengan Nikita Khrushchev, pemimpin rusiasaat itu. Pada setiap pertemuannya selalu ada kerjasama ataupun kesepakatan yang dibangun antara dua Negara baik untuk mengharmoniskan hubungan kedua Negara bahkan sampai pada tahapan dukungan di forum-forum Internasional. Khrushchev balas mengunjungi Soekarno pada tahun 1960, dengan maksud untuk memperluas bidang kerjasama antara kedua Negara.

b. Hubungan Indonesia-Uni Soviet Pasca G-30S PKI

Hubungan Indonesia Rusia pada masa ini menghasilkan SUGBK (Stadion Utama Gelora Bung Karno) dan masih banyak lagi hasil kerja sama yang dilakukan antara kedua Negara. Hubungan Indonesia-Rusia ini mulai menyusut pada pertengahan tahun 1960-an, dimana pada tahun 1965 terjadi tragedi politik di Indonesia dengan pemberontakan dari PKI.

Hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet mengalami titik nadir ketika terjadi peristiwa G 30 September 1965 di tanah air. Tidak lama setelah peristiwa itu, hubungan Indonesia dan Uni Soviet berubah drastis akibat pergantian orde kekuasaan. Seluruh mahasiswa Indonesia yang belajar di Uni Soviet dipaksa pulang. Sebagian diantaranya memenuhi perintah, sebagian yang lain memilih tetap belajar disana. Beasiswa diputus lalu paspor dicabut seakan menambah penderitaan mahasiswa yang menolak pulang ke Indonesia. Penerjemahan karya

penulis dua bangsa dihentikan oleh penguasa baru tanah air. Lembaga Persahabatan Indonesia-Soviet dibubarkan.³¹

Para diaspora Uni Soviet di Indonesia diusir dari bumi nusantara. Akses informasi dan pengetahuan lainnya ditutup rapat-rapat. Dalam rentang waktu panjang hubungan kedua negara mengalami jeda walau tidak sampai putus. Keberadaan diaspora Indonesia di Rusia era lama tidak diketahui nasibnya. Uni Soviet yang memiliki keterhubungan dengan PKI merasakan akibatnya secara langsung karena setelah berkuasa orde baru hubungan ini mulai membeku.³²

2. Pada Masa Orde Baru

Tragedi 1965 di Indonesia menjadi pemicu bagi stagnannya hubungan Indonesia dengan Rusia pada masa Orde Baru. Pemerintah Indonesia yang pada saat itu lebih pro ke barat. Indonesia pada masa Orde Baru lebih mementingkan pembangunan dan pencapaian ekonomi sehingga lebih memilih untuk pro ke Negara barat yang dapat memberikan solusi bagi pembangunan di Indonesia. Keputusan inilah yang membuat Uni Soviet yang anti barat menjaga jarak dalam hubungannya dengan Indonesia. Kebijakan politik Negara-negara barat adalah membendung pengaruh komunis bagi Negara-negara yang berhubungan dengannya maka akan semakin membatasi hubungan Indonesia dengan Uni Soviet dan sekutunya.³³

³¹ Diaspora Indonesia Di Rusia :

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Diaspora+Indonesia+di+Rusia&dn=20120910064526> akses tanggal 11 November 2012

Titik balik hubungan Indonesia dengan Uni Soviet terjadi ketika pada 1989. Presiden Soeharto mengunjungi Uni Soviet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Dalam kunjungan ke Uni Soviet tersebut, pemimpin kedua Negara menandatangani pernyataan persahabatan dan kerjasama bilateral.³⁴

Keruntuhan Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin mempengaruhi perubahan peta politik internasional begitu pula hubungan Indonesia dan Rusia. Indonesia mengakui Federasi Rusia sebagai Negara yang meneruskan Uni Soviet pada Tanggal 28 Desember 1991. Momen tersebut semakin menandai perbaikan hubungan antara Rusia dan Indonesia setelah lama membeku dan stagnan. Tidak ada fakta yang mendetail mengenai hubungan Indonesia dan Rusia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto karena kebijakan kedua Negara yang membatasi hubungan luar negerinya dikarenakan berbeda ideologi. Runtuhnya Uni-Soviet dan berakhirnya era-perang dingin mempengaruhi perubahan peta politik internasional, termasuk mempengaruhi hubungan Indonesia-Rusia.³⁵

Pada tanggal 28 Desember 1991 Pemerintah Indonesia mengakui Federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet. Pada bulan April 2003 diadakan kunjungan resmi Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri ke Rusia, dalam kesempatan tersebut kedua kepala negara menandatangani Deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Rusia dan Indonesia dalam

abad XXI. Di sana, Megawati dan Presiden Rusia, Vladimir Putin menyepakati dilakukannya kerja samateknik dan militer yang lebih erat di masa depan.³⁶

C. Kerjasama Indonesia – Rusia (Tahun 1990-1999)

1. Bidang Transportasi Udara

Kerjasama dalam bidang transportasi antara Indonesia-Rusia terjalin dengan ditandatanganinya sebuah agreement : Air Transport Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Union of Soviet Socialist Republic. (Persetujuan Hubungan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uni Soviet Sosialis) pada tanggal 12 Mei 1990

2. Bidang Kerjasama Bank

Kerjasama dalam bidang kerjasama bidang transportasi antara Indonesia-Rusia terjalin setelah disepakatinya sebuah Arrangement : Arrangement Between the Bank of Indonesia and the Central Bank of the Russian Federation on Payment Transactions Relating to Foreign Trade. (Pengaturan Antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Federasi Rusia Mengenai Transaksi Perdagangan Luar Negeri) pada tanggal 2 Agustus 1994.

3. Bidang Militer

Kerjasama di bidang militer antara Indonesia dan Rusia terjalin dengan adanya MoU : Memorandum of Understanding Between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the State Committee of the Russian Federation on Military and Technical Policy and on Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistic and Technical Assistance. (Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Komite Negara Federasi Rusia Mengenai Kebijakan Teknik dan Militer dan Dalam Rangka Kerjasama di Bidang Peralatan Pertahanan, Logistik dan Bantuan Teknik) pada tanggal 18 April 1996.

4. Bidang Kebudayaan

Kerjasama dalam bidang kebudayaan antara Indonesia dan Rusia terjalin dengan adanya Agreement : Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cultural Cooperation. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Kebudayaan) pada tanggal 14 November 1998.

5. Bidang Perdagangan

Kerjasama dalam bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia disepakati dengan adanya Agreement : Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian

Federation. (Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia) pada tanggal 12 Maret 1999.

6. Bidang Ekonomi

Kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Rusia disepakati dengan adanya Agreement : Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik) pada tanggal 12 Maret 1999.

7. Kerjasama di bidang Penghindaran Pajak Berganda

Kerjasama antara Indonesia dan Rusia di bidang penghindatan pajak berganda disepakati dengan adanya Agreement : Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Pajak Penghasilan) pada tanggal 12 Maret 1999.³⁷

³⁷ Daftar Perjanjian Internasional ,

<http://kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/rusia.htm> akses tanggal 5